

Press Release
Foreign Policy Discussion

Jakarta – Pada tanggal 8 Maret 2016, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyelenggarakan acara *Foreign Policy Discussion* pertama yang bertempat di Aula Lantai Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Acara tersebut diselenggarakan sebagai sarana diseminasi arah kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia ke depan. Di samping itu, acara tersebut juga diselenggarakan sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama dan *networking* antara Kementerian Keuangan RI dengan mitra kerja sama asing (*Development Partners*).

Acara tersebut dihadiri oleh empat Duta Besar dari negara mitra, antara lain Argentina, Chile, Papua Nugini, dan Vietnam. Perwakilan dari tujuh belas kedutaan besar negara mitra lainnya, lima mitra kerja sama asing dan perwakilan unit-unit eselon I di Kementerian Keuangan juga turut berpartisipasi pada acara tersebut.

Foreign Policy Discussion dibuka dengan pemaparan *keynote address* oleh Prof. Suahasil Nazara, Ph.D., Plt. Kepala BKF yang menjelaskan mengenai reformasi fiskal di Indonesia pada sektor penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Secara khusus Prof. Suahasil menekankan mengenai perubahan struktur penerimaan negara di Indonesia, yang semula banyak bersumber dari sektor mineral dan komoditas, kemudian beralih pada penerimaan pajak. Prof. Suahasil juga menekankan mengenai perubahan pada struktur belanja negara yang menunjukkan bahwa saat ini belanja negara lebih diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur dan jaminan kesehatan.

Acara ini dibagi ke dalam tiga sesi, yaitu: (i) '*Indonesia Economic Policy: Optimism amidst Global Uncertainties*'; (ii) '*Supportive Action towards Indonesia Development: The Missing Link or Missing Conception?*'; dan (iii) '*How Indonesia can achieve their national interests and priorities in G-20 Forum*'.

Sesi pertama dimoderatori oleh Dr. Luky Alfirman, Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal dan menghadirkan Dr. Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF sebagai pembicara utama, serta Dr. Ndiame Diop, Ketua Ekonom *World Bank* dan Mr. Steven Tabor, *Country Director Asian Development Bank* Indonesia sebagai panelis. Sesi ini membahas mengenai ketidakpastian perekonomian global, seperti melemahnya perekonomian Republik Rakyat Tiongkok dan harga barang komoditas, ditambah dengan ketidakpastian kebijakan di negara-negara maju yang berdampak pada trayektori pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, langkah untuk mempertahankan momentum penerapan reformasi fiskal, khususnya melalui peningkatan mobilisasi sumber daya domestik dan belanja negara yang berkualitas menjadi hal yang sangat penting sebagai sarana untuk meningkatkan fundamental ekonomi. Di samping itu, Indonesia juga perlu untuk meningkatkan kualitas dari pertumbuhan ekonominya dengan mengembangkan sektor ekonomi unggulan, memenuhi kebutuhan infrastruktur, menerapkan kebijakan diversifikasi ekonomi, khususnya peralihan fokus ekonomi dari sektor komoditas menjadi sektor manufaktur, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh.

Sesi dua dimoderatori oleh Ms. Joanne Evans, Ketua Tim *Australian Treasury Government Partnership Fund* dan menghadirkan Dr. Irfa Ampri, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan

Bilateral (PKRB), BKF bertindak sebagai pembicara utama, serta Mr. Deniz Sertcan, Konselor Kedutaan Besar Republik Federasi Jerman dan Mr. Steven Barraclough, Menteri Konselor *Department of Foreign Affairs and Trade* Australia sebagai panelis . Sesi ini bertujuan untuk menggambarkan peran dari Kementerian Keuangan dalam memajukan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, dan bagaimana hal tersebut dapat tercapai melalui kerja sama internasional, khususnya dalam mengembangkan kapasitas penyusunan kebijakan dan memenuhi kebutuhan kualitas tenaga kerja. Sesi ini juga membahas mengenai bentuk kerja sama yang dapat dijalin oleh Indonesia dan mitra kerja sama asing, seperti *benchmarking* dalam menyusun kebijakan, penelitian bersama, penempatan tenaga ahli, pemberian beasiswa, pemberian *capacity building*, dan program magang. Di samping itu, sesi ini mendiskusikan tantangan dalam menyamakan prioritas Indonesia dengan mitra kerja sama asing, dan bagaimana cara untuk mengembangkan metode pengawasan dan evaluasi guna meningkatkan kualitas dari kerja sama yang telah terjalin. Sebagai solusinya, disarankan agar pertemuan koordinasi dengan mitra kerja sama asing dapat diformalkan sehingga kualitas dari kerja sama antara Indonesia dan mitra kerja sama asing dapat meningkat.

Sesi terakhir dimoderatori oleh Dr. Irfa Ampri, Kepala PKRB, BKF dan menghadirkan Dr. Syurkani, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF sebagai pembicara, serta Mr. Ndiame Diop, Ketua Ekonom *World Bank* dan Mr. Alexander Boehmer, Kepala Perwakilan *OECD* Indonesia sebagai panelis. Sesi ini membahas mengenai peran Indonesia di forum G20 dalam konteks pengembangan ekonomi global dan bagaimana sistem tataran global dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada untuk mewujudkan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang, khususnya selama masa pemulihan ekonomi global yang saat ini masih lambat dan tidak menyeluruh. Dapat disimpulkan dari sesi ketiga ini mengenai pentingnya koordinasi kebijakan antar negara untuk memastikan stabilitas keuangan global dan makro ekonomi, di mana dalam hal ini Indonesia ingin agar G20 dapat menekankan pembahasan mengenai kerangka reformasi struktural dan regulasi yang dipandang sebagai prasyarat dalam pengembangan ekonomi global yang berkelanjutan.

Acara tersebut ditutup dengan *closing remarks* dari Dr. Irfa Ampri, Kepala PKRB yang menyatakan bahwa berbagai pandangan dan masukan dalam diskusi hari ini akan sangat bermanfaat guna membentuk kerangka kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan mitra kerja sama asing di masa mendatang. Melihat relevansi dan pentingnya program ini sebagai sarana untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi terkini, menghimpun pandangan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah, sekaligus juga menjalin *networking* yang kuat mitra kerja sama asing, Dr. Irfa menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan berencana untuk menyelenggarakan acara ini secara rutin setiap tahunnya dan tidak tertutup kemungkinan Menteri Keuangan akan menjadi *keynote speaker* di penyelenggaraan *Foreign Policy Discussion* berikutnya